



BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPAEN KETAPANG

LAPORAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TRIWULAN IV



2024

www.bapenda.ketapangkab.go.id



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga Laporan Evaluasi Terhadap Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2024 Triwulan IV (Per 31 Desember 2024) pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang, dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan Renja berdasarkan realisasi DPA yang berisi pelaksanaan dan penyerapan anggaran di tingkat Badan Pendapatan Daerah selama periode I Tahun 2024. Dengan adanya laporan evaluasi ini, diharapkan dapat memberikan gambaran pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang berdasarkan nilai persentase realisasinya dibandingkan dengan nominal anggaran tahun berjalan. Selain itu, adanya laporan evaluasi ini digunakan untuk mengetahui kebijakan atau tindakan perencanaan yang perlu diambil pada evaluasi Renja di periode laporan berikutnya.

Kami berharap semoga laporan ini dapat memberi manfaat kepada banyak pihak dan berguna sebagai bahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang dalam mendorong terwujudnya tata pemerintahan yang baik di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Ketapang.

Ketapang, Desember 2024
Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Ketapang,

Dr. P. Deyie Frantito, M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19700411 199003 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....2

DAFTAR ISI.....3

DAFTAR TABEL.....4

BAB I PENDAHULUAN.....1

1.1. Latar Belakang1

1.2. Dasar Hukum2

1.3. Maksud dan Tujuan.....4

1.4. Metode Evaluasi Renja Perangkat Daerah.....5

1.5. Sistematika.....6

BAB II MUATAN RENJA DAN KONSISTENSI ANTAR DOKUMEN7

2.1. Tujuan dan Sasaran Renja7

2.2. Konsistensi antara program, kegiatan, dan sub kegiatan.....9

BAB III CAPAIAN KINERJA RENJA PERANGKAT DAERAH.....19

3.1. Capaian Kinerja Sasaran19

3.2. Capaian Kinerja Program dan Anggaran21

3.3. Capaian Kinerja Kegiatan dan Anggaran23

3.4. Capaian Kinerja Sub Kegiatan dan Anggaran27

BAB IV FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA ..36

a.1. Faktor Pendorong36

a.2. Faktor Penghambat.....36

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI TINDAK LANJUT37

5.1. Kesimpulan.....37

5.2. Rekomendasi Tindak lanjut.....37

LAMPIRAN38

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Skala Predikat Kinerja dan Realisasi Keuangan	5
Tabel 2.2 Rumusan tujuan dan sasaran yang akan dicapai pada Renja Bapenda Kabupaten Ketapang	8
Tabel 3.2 Konsistensi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan antara Renja dengan Renstra, RKPD dan DPA	10
Tabel 4.2 Konsistensi Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja dengan Renstra, RKPD dan DPA	18
Tabel 5.3 Pencapaian Kinerja Sasaran	20
Tabel 6.3 Pencapaian Kinerja Program dan Anggaran	22
Tabel 7.3 Pencapaian Kinerja Kegiatan dan Anggaran	24
Tabel 8.3 Pencapaian Kinerja Sub Kegiatan dan Anggaran	28

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka setiap perangkat daerah diwajibkan untuk melakukan evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah yang telah disusun.

Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Rencana Kerja (Renja) mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Dalam pelaksanaan Renja Perangkat Daerah perlu dilakukan evaluasi guna untuk mengetahui efektifitas dan konsistensinya. Evaluasi terhadap hasil Renja Badan Pendapatan Daerah mencakup program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi dan dana indikatif. Evaluasi dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah. Penilaian digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi dan penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan, kelompok sasaran, lokasi dan penyerapan dana indikatif kegiatan Renja dicapai, serta sasaran dan prioritas pembangunan tahunan Daerah Kabupaten Ketapang. Evaluasi pelaksanaan Renja Badan Pendapatan Daerah dilakukan setiap triwulan dalam tahun anggaran berjalan.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum dari penyusunan Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang pada Triwulan IV Tahun 2024 ini adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- c. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

- h. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- m. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 59) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2020 Nomor 15);

- o. Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ketapang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2021 Nomor 3)

1.3. Maksud dan Tujuan

Laporan Evaluasi terhadap hasil renja tahun 2024 dimaksudkan untuk menjamin keterkaitan khususnya antara perencanaan dan penganggaran berbagai program, kegiatan dan sub kegiatan serta mengetahui tingkat ketercapaiannya. Sementara itu, tujuan penyusunan laporan evaluasi terhadap hasil Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang pada Triwulan IV Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Mendeskripsikan evaluasi hasil renja tahun 2024 berdasarkan target-target indikator yang tercantum dalam Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang pada Triwulan IV Tahun 2024;
- b. Untuk mengetahui faktor pendorong dan penghambat keberhasilan pencapaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka mendukung capaian target kinerja tahunan sasaran.
- c. Memberikan kesimpulan dan rekomendasi hasil evaluasi untuk penyusunan perubahan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang pada Triwulan berikutnya dan sebagai dasar pertimbangan dalam menyusun Renja tahun berikutnya.

1.4. Metode Evaluasi Renja Perangkat Daerah

Metode evaluasi renja perangkat daerah meliputi teknik pengumpulan data, metode pengolahan dan analisis data.

a. Teknik Pengumpulan Data.

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan formulir evaluasi Renja yang akan diisi capaiannya oleh masing-masing unit kerja di Perangkat Daerah.

b. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data dengan menghitung: (1) persentase capaian kinerja masing-masing indikator dengan membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja dalam Renja Perangkat Daerah; (2) persentase kinerja keuangan dengan membandingkan antara realisasi keuangan dengan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD. Predikat kinerja dan realisasi keuangan menggunakan skala nilai peringkat kinerja sebagai berikut :

Tabel 1.1 Skala Predikat Kinerja dan Realisasi Keuangan

No.	Interval Nilai Evaluasi				Status
	s/d TW I	s/d TW II	s/d TW III	s/d TW IV	
1.	23 % ≤ 100 %	46 % ≤ 100 %	68 % ≤ 100%	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi (ST)
2.	19 % ≤ 22 %	38 % ≤ 45 %	57 % ≤ 67%	76% ≤ 90%	Tinggi (T)
3.	17 % ≤ 18 %	33% ≤ 37 %	50 % ≤ 56%	66% ≤ 75%	Sedang (S)
4.	14 % ≤ 16 %	26 % ≤ 32 %	39 % ≤ 49%	51% ≤ 65%	Rendah (R)
5.	≤ 13 %	≤ 25 %	≤ 38%	≤ 50%	Sangat Rendah (SR)

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

1. Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

2. Hasil Sedang

Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.

3. Hasil Rendah dan Sangat Rendah

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

c. Teknik Analisis Data

Teknis analisis dilakukan dengan teknik perbandingan antara realisasi kinerja dan keuangan dengan target kinerja dan anggaran; dan analisis permasalahan yang hadapi perangkat daerah dalam pencapaian target Renja Perangkat Daerah.

1.5. Sistematika

Sistematika Penyusunan Laporan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Triwulan III Tahun 2024 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang terdiri dari :

Bab I Pendahuluan.

Bab ini berisi tentang latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan metode evaluasi renja perangkat daerah, dan sistematika.

Bab II Muatan Renja dan Konsistensi Antar Dokumen.

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran renja, konsistensi antara program, kegiatan, dan sub kegiatan.

Bab III Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah.

Bab ini berisi tentang capaian kinerja sasaran, capaian kinerja program, capaian kinerja kegiatan, capaian kinerja sub kegiatan, dan penyerapan anggaran.

Bab IV Faktor Pendorong dan Penghambat Pencapaian Kinerja.

Bab ini berisi tentang faktor pendorong yang mendorong tercapainya suatu target, dan faktor penghambat yang menghambat tercapainya suatu target kinerja program prioritas.

Bab V Kesimpulan dan Rekomendasi Tindak Lanjut.

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan rekomendasi tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya dengan usulan tindakan yang diperlukan pada triwulan berikutnya guna membantu memastikan tercapainya sasaran pembangunan tahunan.

BAB II

MUATAN RENJA DAN KONSISTENSI ANTAR DOKUMEN

2.1. Tujuan dan Sasaran Renja

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk menangani isu strategis yang dihadapi. Adapun tujuan Renja Badan Pendapatan Daerah tahun 2024 adalah Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Daerah Sesuai Dengan Potensi Daerah.

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional. Adapun sasaran Renja Badan Pendapatan Daerah tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- a. Menjadi acuan bagi Badan Pendapatan Daerah dalam menyusun rencana program dan kegiatan dalam 1 (satu) tahun anggaran yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ketapang;
- b. Untuk memasukkan Program dan Kegiatan yang ada di Renja ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Anggaran Sementara Tahun 2024 serta memberikan informasi permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024;
- c. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumber daya dan anggaran dalam peningkatan kinerja serta memberikan alternatif pemecahan permasalahan;
- d. Untuk menetapkan komitmen kinerja yang dapat dijadikan tolak ukur kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang sehingga terdapat kepastian dan konsistensi dalam menyusun perencanaan, penganggaran dan pengawasan.
- e. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan penganggaran dengan memperhatikan kerangka regulasi dan kerangka anggaran Perangkat Daerah yang telah ditetapkan pagu indikatifnya.

Adapun rumusan tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Renja Badan Pendapatan Daerah tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 2.2 di bawah ini :

Tabel 2.2 Rumusan tujuan dan sasaran yang akan dicapai pada Renja Bapenda Kabupaten Ketapang

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun 2024
1	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Daerah Sesuai Dengan Potensi Daerah	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Persentase Penerimaan Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD	%	10%

Sumber data : IKU OPD Bapenda

2.2. Konsistensi antara program, kegiatan, dan sub kegiatan

Perencanaan dan penganggaran merupakan rangkaian kegiatan dalam satu kesatuan dan merupakan suatu siklus yang mempunyai hubungan yang erat dan bersifat realistis, tepat sasaran dan konsisten. Kesesuaian antara dokumen perencanaan dan penganggaran sangatlah penting. Hal ini diharapkan akan mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan meningkatkan kinerja pemerintah daerah Kabupaten Ketapang dalam pengelolaan keuangan dan pelayanan publik sehingga akan berdampak pada tujuan pembangunan daerah. Ketidakkonsistenan antara dokumen perencanaan dengan penganggaran akan mengganggu pelaksanaan program dan kegiatan yang dijabarkan dalam APBD sehingga pembiayaan yang dilakukan oleh pemerintah menjadi tidak optimal dan mengakibatkan pemborosan anggaran.

Untuk mengetahui lebih lanjut konsistensi perencanaan dan penganggaran Renja Perangkat Daerah perlu dilakukan analisis terhadap konsistensi program, kegiatan, indikator, target dan alokasi pendanaan indikatif pada Renja Perangkat Daerah dengan dokumen Renstra 2021 - 2026, RKPD 2021 - 2026, dan DPA 2024, sebagai berikut :

Tabel 3.2 Konsistensi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan antara Renja dengan Renstra, RKPD dan DPA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja 2024)	Indikator (Renja 2024)	Renstra Periode 2021-2026	RKPD Tahun 2024	DPA Tahun 2024	Ket
1	2	3	4	5	6	7
5.	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
5.02.	KEUANGAN					
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					
5.02.01.201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
5.02.01.201.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	☑	☑	☑	-
5.02.01.201.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	☑	☑	☑	-
5.02.01.201.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	☑	☑	☑	-
5.02.01.201.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	☑	☑	☑	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja 2024)	Indikator (Renja 2024)	Renstra Periode 2021- 2026	RKPD Tahun 2024	DPA Tahun 2024	Ket
1	2	3	4	5	6	7
5.02.01.201.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	☑	☑	☑	-
5.02.01.201.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	☑	☑	☑	-
5.02.01.201.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	☑	☑	☑	-
5.02.01.202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
5.02.01.202.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	☑	☑	☑	-
5.02.01.202.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	☑	☑	☑	-
5.02.01.202.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	☑	☑	☑	-
5.02.01.202.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	☑	☑	☑	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja 2024)	Indikator (Renja 2024)	Renstra Periode 2021- 2026	RKPD Tahun 2024	DPA Tahun 2024	Ket
1	2	3	4	5	6	7
5.02.01.202.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	☑	☑	☑	-
5.02.01.203	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersediannya Administrasi Barang Milik Daerah				
5.02.01.203.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		☑	☑	Diusulkan Tambahan Sub Kegiatan Pada Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dan termasuk dalam DPA
5.02.01.203.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		☑	☑	Diusulkan Tambahan Sub Kegiatan Pada Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dan termasuk dalam DPA
5.02.01.203.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	☑	☑	☑	-
5.02.01.205	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersediannya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
5.02.01.205.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		☑		Diusulkan Tambahan Sub Kegiatan Pada Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dan tidak masuk dalam DPA
5.02.01.205.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		☑	☑	Diusulkan Tambahan Sub Kegiatan Pada Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dan masuk dalam DPA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja 2024)	Indikator (Renja 2024)	Renstra Periode 2021-2026	RKPD Tahun 2024	DPA Tahun 2024	Ket
1	2	3	4	5	6	7
5.02.01.205.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	☑	☑	☑	-
5.02.01.206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersediannya Administrasi Umum Perangkat Daerah				
5.02.01.206.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	☑	☑	☑	-
5.02.01.206.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	☑	☑	☑	-
5.02.01.206.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	☑	☑	☑	-
5.02.01.206.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	☑	☑	☑	-
5.02.01.206.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	☑	☑	☑	-
5.02.01.207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersediannya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
5.02.01.207.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		☑		Diusulkan Tambahan Sub Kegiatan Pada Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tetapi tidak termasuk dalam DPA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja 2024)	Indikator (Renja 2024)	Renstra Periode 2021-2026	RKPD Tahun 2024	DPA Tahun 2024	Ket
1	2	3	4	5	6	7
5.02.01.207.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		☑		Diusulkan Tambahan Sub Kegiatan Pada Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tetapi tidak termasuk dalam DPA
5.02.01.207.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Unit Mebel yang Disediakan	☑	☑	☑	-
5.02.01.207.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		☑	☑	Diusulkan Tambahan Sub Kegiatan Pada Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dan termasuk dalam DPA
5.02.01.207.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	☑	☑	☑	-
5.02.01.207.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	☑	☑	☑	-
5.02.01.208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
5.02.01.208.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	☑	☑	☑	-
5.02.01.208.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	☑	☑	☑	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja 2024)	Indikator (Renja 2024)	Renstra Periode 2021- 2026	RKPD Tahun 2024	DPA Tahun 2024	Ket
1	2	3	4	5	6	7
5.02.01.208.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	☑	☑	☑	-
5.02.01.209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah				
5.02.01.209.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	☑	☑	☑	-
5.02.01.209.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		☑	☑	Diusulkan Tambahan Sub Kegiatan Pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan termasuk dalam DPA
5.02.01.209.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	☑	☑	☑	-
5.02.01.209.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	☑	☑	☑	-
5.02.01.209.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	☑	☑	☑	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja 2024)	Indikator (Renja 2024)	Renstra Periode 2021- 2026	RKPD Tahun 2024	DPA Tahun 2024	Ket
1	2	3	4	5	6	7
5.02.03.201.11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah		<input checked="" type="checkbox"/>		Diusulkan Tambahan Sub Kegiatan Pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan tidak termasuk ke dalam DPA
5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah					
5.02.04.201	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Terkelolanya Pengelolaan pendapatan Daerah				
5.02.04.201.01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-
5.02.04.201.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-
5.02.04.201.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-
5.02.04.201.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-
5.02.04.201.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja 2024)	Indikator (Renja 2024)	Renstra Periode 2021- 2026	RKPD Tahun 2024	DPA Tahun 2024	Ket
1	2	3	4	5	6	7
5.02.04.201.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	☑	☑	☑	-
5.02.04.201.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	☑	☑	☑	-
5.02.04.201.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	☑	☑	☑	-
5.02.04.201.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	☑	☑	☑	-
5.02.04.201.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	☑	☑	☑	-
5.02.04.201.11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	☑	☑	☑	-
5.02.04.201.12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	☑	☑	☑	-
5.02.04.201.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	☑	☑	☑	-
5.02.04.201.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	☑	☑	☑	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja 2024)	Indikator (Renja 2024)	Renstra Periode 2021- 2026	RKPD Tahun 2024	DPA Tahun 2024	Ket
1	2	3	4	5	6	7
5.02.04.201.15	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Diusulkan Tambahan Sub Kegiatan Pada Kegiatan Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah dan termasuk kedalam DPA

Keterangan: ? = Konsisten; X = Tidak konsisten

Tabel 4.2 Konsistensi Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja dengan Renstra, RKPD dan DPA

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renja 2024)	Renstra Periode 2021-2026	RKPD Tahun 2024	DPA Tahun 2024	Ket
1	Jumlah Program	2	2	2	-
2	Jumlah Kegiatan	9	9	9	-
3	Jumlah Sub Kegiatan	43	53	49	Adanya Penambahan / usulan / perubahan pada Sub Kegiatan

BAB III

CAPAIAN KINERJA RENJA PERANGKAT DAERAH

Capaian kinerja Renja Perangkat Daerah merupakan gambaran atas evaluasi rencana kinerja program/kegiatan dalam setiap tahun pelaksanaannya sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Renja dan Renstra Perangkat Daerah. Target kinerja dimaksud menunjukkan nilai kualitatif maupun kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat program, kegiatan dan sub kegiatan, dan merupakan pembandingan bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah menggunakan evaluasi realisasi DPA-Perangkat Daerah. Hasil evaluasi realisasi DPA-Perangkat Daerah Triwulan IV tahun anggaran merupakan bahan evaluasi akhir periode pelaksanaan Renja Perangkat Daerah yang disertai dengan predikat kinerja dengan skala Sangat Tinggi (ST), Tinggi (T), Sedang (S), Rendah (R), dan Sangat Rendah (SR). Adapun analisis capaian kinerja dilakukan terhadap capaian kinerja sasaran, program, kegiatan, subkegiatan beserta penyerapan anggaran.

3.1. Capaian Kinerja Sasaran

Capaian kinerja sasaran merupakan analisis terhadap realisasi target kinerja IKU Perangkat Daerah yang tertuang dalam Renja berdasarkan Renstra PD. Adapun hasil analisisnya, yaitu sebagai berikut :

Tabel 5.3 Pencapaian Kinerja Sasaran

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Kinerja Sasaran Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja 2024 (%)	Kategori Kinerja (Status)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Daerah Sesuai Dengan Potensi Daerah	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Persentase Penerimaan Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD	%	10%	12%	120%	ST (Sangat Tinggi)	-

Sasaran Renja PD yang sesuai dengan Renstra yaitu **“Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah”** Adapun realisasi target sasaran tersebut belum dapat dianalisis disebabkan oleh data kinerja baru tersedia pada akhir tahun.

3.2. Capaian Kinerja Program dan Anggaran

Capaian kinerja program dan anggaran merupakan analisis terhadap realisasi target program dan tingkat penyerapan anggaran sesuai dengan dokumen Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Adapun hasil analisisnya dapat dilihat pada tabel 6.3 berikut ini :

Tabel 6.3 Pencapaian Kinerja Program dan Anggaran

No	Program	Indikator Kinerja Program	Realisasi Kinerja 2023		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran 2024		Tingkat Capaian		Status Kinerja	
							I		II		III		IV				Kinerja dan Anggaran			
																	2024 (%)			
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		K	Rp
			K	-	K	-	K	-	K	-	K	Rp0	K	Rp0	K	-	K	Rp		
5.	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		100%	19.434.348,11	100%	25.355.137,75	15%	3.722.364,32	15%	3.899.717,92	25%	6.313.901.724,00	28%	7.163.537.812,00	83,22%	21.099.521,77	94,84%	94,84%	ST	ST
5.02.	KEUANGAN		100%	19.434.348,11	100%	25.355.137,75	15%	3.722.364,32	15%	3.899.717,92	25%	6.313.901,72	28%	7.163.537.812,00	83,22%	21.099.521,77	94,84%	94,84%	ST	ST
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	16.017.946,21	100%	20.126.841,15	16%	3.293.314,52	15%	3.052.727,26	25%	5.083.236,41	23%	4.584.824.924,00	79,57%	16.014.103,12	92,42%	92,42%	ST	ST
5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Terwujudnya Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	100%	3.416.401,90	100%	5.228.296,60	8%	429.049,80	16%	846.990,66	24%	1.230.665,31	49%	2.578.712,89	97,27%	5.085.418,65	97,27%	97,27%	ST	ST
Rata-rata capaian kinerja (%)																	94,84%	94,84%		
Predikat Kinerja																	ST	ST		

Keterangan: Sangat Tinggi (ST); Tinggi (T); Sedang (S); Rendah (R); Sangat Rendah (SR), Angka dalam ribuan rupiah (000).

Program Renja PD terdiri dari 2 (Dua). Program pertama, memiliki tingkat realisasi yaitu sebesar 92,42% dengan predikat kinerja ST (Sangat Tinggi). sementara tingkat penyerapan anggarannya, yaitu sebesar 92,42% dengan predikat ST (Sangat Tinggi) kondisi ini disebabkan oleh capaian penyerapan anggaran di triwulan ke IV, Program kedua memiliki tingkat realisasi yaitu sebesar 97,27% dengan predikat ST (Sangat Tinggi), Adapun rata-rata capaian kinerja program, yaitu 97,27% dengan Predikat ST (Sangat Tinggi) dengan rata-rata capaian Kinerja sebesar 94,84% dengan predikat ST (Sangat Tinggi) serta capaian anggaran sebesar 94,84% dengan predikat ST (Sangat Tinggi).

3.3. Capaian Kinerja Kegiatan dan Anggaran

Capaian kinerja kegiatan dan anggaran merupakan analisis terhadap realisasi target kegiatan dan penyerapan anggaran sesuai dengan Renja PD tahun 2024 Adapun hasil analisisnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 7.3 Pencapaian Kinerja Kegiatan dan Anggaran

No	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Realisasi Kinerja 2023		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran		Status Kinerja	
							I		II		III		IV							
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12	
			K	-	K	-	K	-	K	-	K	-	K	-	K	-	K	-		
5.02.01.02.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	184.288,14	100%	261.000,00	34%	88.658.450,00	16%	40.961.200,00	33%	85.967.850,00	17%	44.922.950,00	99,81%	260.510.450,00	99,81%	99,81%	ST	ST
5.02.01.02.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	13.074.341,17	100%	16.049.061,15	16%	2.561.558.545,00	12%	1.910.079.091,00	26%	4.129.938.744,00	21%	3.443.683.636,00	75,05%	12.045.260.016,00	75,05%	75,05%	ST	ST
5.02.01.02.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	19.904,79	100%	30.000,00	38%	11.443.228,00	22%	6.463.792,00	40%	11.928.556,00	0%	-	99,45%	29.835.576,00	99,45%	99,45%	ST	ST
5.02.01.02.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	49.892,67	100%	210.000,00	0%	-	20%	42.983.780,00	59%	124.354.840,00	0%	-	79,69%	167.338.620,00	79,69%	79,69%	ST	ST
5.02.01.02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	1.303.209,11	100%	1.653.380,00	28%	461.534.197,00	18%	298.214.195,00	23%	372.586.883,00	31%	507.945.964,00	99,21%	1.640.281.239,00	99,21%	99,21%	ST	ST
5.02.01.02.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	100%	509.278,00	100%	885.099,02	0%	-	59%	525.804.120,00	0%	-	40%	356.990.000,00	99,74%	882.794.120,00	99,74%	99,74%	ST	ST

	Pemerintah Daerah	Urusan Pemerintah Daerah																		
5.02.01.02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	305.940,23	100%	350.450,98	22%	75.687.700,00	15%	51.973.080,00	28%	99.127.041,00	22%	78.517.424,00	87,12%	305.305.245,00	87,12%	87,12%	ST	ST
5.02.01.02.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	571.092,10	100%	687.850,00	14%	94.432.400,00	26%	176.248.000,00	38%	259.332.500,00	22%	152.764.950,00	99,26%	682.777.850,00	99,26%	99,26%	ST	ST
5.02.04.02.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	100%	3.416.401,90	100%	5.228.296,60	8%	429.049.797,00	16%	846.990.659,00	24%	1.230.665.310,00	49%	2.578.712.888,00	97,27%	5.085.418.654,00	97,27%	97,27%	ST	ST
Rata-rata capaian kinerja (%)																	92,96%	92,96%		
Predikat Kinerja																	ST	ST		

Keterangan: Sangat Tinggi (ST); Tinggi (T); Sedang (S); Rendah (R); Sangat Rendah (SR), Angka dalam ribuan rupiah (000).

Kegiatan Renja PD terdiri dari 9 Kegiatan diantaranya :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, memiliki tingkat realisasi yaitu sebesar 99,81% dengan predikat kinerja ST (Sangat Tinggi). Sementara tingkat penyerapan anggarannya, yaitu sebesar 99,81% dengan predikat Anggaran ST (Sangat Tinggi).
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah memiliki tingkat realisasi yaitu sebesar 75,05% dengan predikat kinerja ST (Sangat Tinggi). Sementara tingkat penyerapan anggarannya, yaitu sebesar 75,05% dengan predikat Anggaran ST (Sangat Tinggi).
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah memiliki tingkat realisasi yaitu sebesar 99,45% dengan predikat kinerja ST (Sangat Tinggi). Sementara tingkat penyerapan anggarannya, yaitu sebesar 99,45% dengan predikat Anggaran ST (Sangat Tinggi).
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah memiliki tingkat realisasi yaitu sebesar 79,69% dengan predikat kinerja ST (Sangat Tinggi). Sementara tingkat penyerapan anggarannya, yaitu sebesar 79,69% dengan predikat Anggaran ST (Sangat Tinggi).
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah memiliki tingkat realisasi yaitu sebesar 99,21% dengan predikat kinerja ST (Sangat Tinggi). Sementara tingkat penyerapan anggarannya, yaitu sebesar 99,21% dengan predikat Anggaran ST (Sangat Tinggi).
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah memiliki tingkat realisasi yaitu sebesar 99,74% dengan predikat kinerja ST (Sangat Tinggi). Sementara tingkat penyerapan anggarannya, yaitu sebesar 99,74% dengan predikat Anggaran ST (Sangat Tinggi).
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah memiliki tingkat realisasi yaitu sebesar 87,12% dengan predikat kinerja ST (Sangat Tinggi). Sementara tingkat penyerapan anggarannya, yaitu sebesar 87,12% dengan predikat Anggaran ST (Sangat Tinggi).
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah memiliki tingkat realisasi yaitu sebesar 99,26% dengan predikat kinerja ST (Sangat Tinggi). Sementara tingkat penyerapan anggarannya, yaitu sebesar 99,26% dengan predikat Anggaran ST (Sangat Tinggi).
9. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah memiliki tingkat realisasi yaitu sebesar 97,27% dengan predikat kinerja ST (Sangat Tinggi). Sementara tingkat penyerapan anggarannya, yaitu sebesar 97,27% dengan predikat Anggaran ST (Sangat Tinggi).

Adapun rata-rata capaian kinerja kegiatan, yaitu sebesar 92,96% dengan predikat kinerja ST (Sangat Tinggi). Sementara tingkat penyerapan anggarannya, yaitu sebesar 92,96% dengan predikat Anggaran ST (Sangat Tinggi). Kondisi ini terjadi disebabkan adanya penyerapan anggaran pada Triwulan IV.

3.4. Capaian Kinerja Sub Kegiatan dan Anggaran

Capaian kinerja sub kegiatan dan anggaran merupakan analisis terhadap realisasi target sub kegiatan dan penyerapan anggaran sesuai dengan Renja PD tahun 2024 Adapun hasil analisisnya dapat dilihat pada tabel 8.3 berikut ini :

Tabel 8.3 Pencapaian Kinerja Sub Kegiatan dan Anggaran

No	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja 2023		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran 2024 (%)		Status Kinerja	
							I		II		III		IV		16	17	18	19	20	21
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						
1	2	3	K	-	K	-	K	,00							K	,00	K	Rp	K	Rp
5.02.01.02.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dok	34.857,14	8 Dok	41.000,00	2	9.207,35	1	7.161,00	3	14.859,50	2	9.719,00	8 Dok	40.946,85	99,87%	99,87%	ST	ST
5.02.01.02.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dok	9.938,00	1 Dok	10.000,00	1	9.987,05	-	,00	-	,00	-	,00	1 Dok	9.987,05	99,87%	99,87%	ST	ST
5.02.01.02.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dok	9.948,05	1 Dok	10.000,00	-	,00	-	,00	1	9.846,85	-	,00	1 Dok	9.846,85	98,47%	98,47%	ST	ST
5.02.01.02.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dok	9.980,30	1 Dok	10.000,00	1	9.924,50	-	,00	-	,00	-	,00	1 Dok	9.924,50	99,25%	99,25%	ST	ST
5.02.01.02.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dok	9.954,20	1 Dok	10.000,00	-	,00	-	,00	1	9.944,65	-	,00	1 Dok	9.944,65	99,45%	99,45%	ST	ST

5.02.01.02.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Lap	99.815,90	12 Lap	166.500,00	4	59.539,55	2	25.916,20	4	49.256,85	2	31.767,45	12 Lap	166.480,05	99,99%	99,99%	ST	ST
5.02.01.02.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Lap	9.794,55	12 Lap	13.500,00	-	,00	7	7.884,00	2	2.060,00	3	3.436,50	12 Lap	13.380,50	99,11%	99,11%	ST	ST
5.02.01.02.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	46 Dok	12.632.540,37	46 OB	15.579.060,90	7	2.450.713,18	5	1.833.195,69	12	3.992.084,18	10	3.311.621,64	34 OB	11.587.614,68	74,38%	74,38%	ST	ST
5.02.01.02.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dok	259.969,74	12 Dok	260.000,00	3	66.687,97	2	40.800,00	4	91.276,95	3	61.200,00	12 Dok	259.964,92	99,99%	99,99%	ST	ST
5.02.01.02.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dok	152.718,43	12 Dok	177.011,45	2	32.111,40	2	29.713,50	3	45.423,96	4	57.698,00	11 Dok	164.946,86	93,18%	93,18%	ST	ST
5.02.01.02.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Lap	9.948,01	1 Lap	10.000,00	1	9.874,00	-	,00	-	,00	-	,00	1 Lap	9.874,00	98,74%	98,74%	ST	ST
5.02.01.02.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	12 Lap	19.164,62	12 Lap	22.988,80	1	2.172,00	3	6.369,90	1	1.153,66	7	13.164,00	12 Lap	22.859,56	99,44%	99,44%	ST	ST

		Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
5.02.01.02. 03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Lap	,00	1 Lap	5.000,00	0	2.465,94	-	,00	0	2.465,94	-	,00	1 Lap	4.931,87	98,64%	98,64%	ST	ST
5.02.01.02. 03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Lap	,00	1 Lap	5.000,00	1	2.514,00	-	,00	0	2.402,00	-	,00	1 Lap	4.916,00	98,32%	98,32%	ST	ST
5.02.01.02. 03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Lap	19.904,79	1 Lap	20.000,00	0	6.463,29	0	6.463,79	0	7.060,62	-	,00	1 Lap	19.987,70	99,94%	99,94%	ST	ST
5.02.01.02. 05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dok	9.992,76	1 Dok	10.000,00	-	,00	1	6.983,78	0	3.015,98	-	,00	1 Dok	9.999,76	100,00%	100,00%	ST	ST
5.02.01.02. 05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	10 Org	39.899,90	10 Org	200.000,00	-	,00	2	36.000,00	6	121.338,86	-	,00	8 Org	157.338,86	78,67%	78,67%	ST	ST
5.02.01.02. 06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	39.928,56	1 Paket	52.380,00	0	11.994,11	0	9.998,97	0	10.002,91	0	20.370,95	1 Paket	52.366,92	99,98%	99,98%	ST	ST
5.02.01.02. 06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	389.890,49	1 Paket	417.000,00	0	113.785,54	0	77.367,14	0	117.541,65	0	107.387,37	1 Paket	416.081,70	99,78%	99,78%	ST	ST
5.02.01.02. 06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	374.701,35	1 Paket	484.000,00	1	253.691,56	0	98.204,35	0	59.166,85	0	68.668,10	1 Paket	479.730,86	99,12%	99,12%	ST	ST
5.02.01.02. 06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	64 Lap	498.688,72	64 Lap	700.000,00	8	82.063,00	10	112.643,75	17	185.875,47	28	311.519,55	63 Lap	692.101,77	98,87%	98,87%	ST	ST
5.02.01.02. 07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Unit Mebel yang Disediakan	60 Paket	29.998,00	60 Paket	100.000,00	-	,00	28	46.496,00	-	,00	32	53.310,00	60 Paket	99.806,00	99,81%	99,81%	ST	ST

5.02.01.02.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit		1 Unit	550.000,00	-	,00	1	399.811,00	-	,00	0	148.585,00	1 Unit	548.396,00	99,71%	99,71%	ST	ST
5.02.01.02.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit	449.301,00	6 Unit	138.267,20	-	,00	2	49.497,12	-	,00	4	88.265,00	6 Unit	137.762,12	99,63%	99,63%	ST	ST
5.02.01.02.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12 Unit	29.979,00	12 Unit	96.831,82	-	,00	4	30.000,00	-	,00	8	66.830,00	12 Unit	96.830,00	100,00%	100,00%	ST	ST
5.02.01.02.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Lap	9.996,00	1 Lap	3.000,00	0	456,00	1	1.500,00	0	1.044,00	-	,00	1 Lap	3.000,00	100,00%	100,00%	ST	ST
5.02.01.02.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Lap	265.965,67	12 Lap	305.000,00	3	64.945,60	2	40.204,33	3	88.699,64	3	66.100,57	10 Lap	259.950,14	85,23%	85,23%	ST	ST
5.02.01.02.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Lap	29.978,56	4 Lap	42.450,98	1	10.286,11	1	10.268,75	1	9.383,40	1	12.416,85	4 Lap	42.355,11	99,77%	99,77%	ST	ST
5.02.01.02.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	69.645,00	1 Unit	103.500,00	0	14.983,00	0	14.983,00	1	65.210,00	0	7.891,00	1 Unit	103.067,00	99,58%	99,58%	ST	ST
5.02.01.02.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	44 Unit	257.640,10	44 Unit	294.350,00	9	60.945,40	4	27.017,00	17	114.751,50	13	87.656,95	43 Unit	290.370,85	98,65%	98,65%	ST	ST

5.02.01.02.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	149.977,00	1 Unit	180.000,00	-	,00	1	104.500,00	0	53.000,00	0	22.500,00	1 Unit	180.000,00	100,00%	100,00%	ST	ST
5.02.01.02.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	108 Unit	63.830,00	108 Unit	50.000,00	23	10.504,00	43	19.748,00	32	14.811,00	11	4.937,00	108 Unit	50.000,00	100,00%	100,00%	ST	ST
5.02.01.02.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	38 Unit	30.000,00	38 Unit	60.000,00	5	8.000,00	6	10.000,00	7	11.560,00	19	29.780,00	38 Unit	59.340,00	98,90%	98,90%	ST	ST
5.04.04.02.01.01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	1 Dok	131.499,95	1 Dok	168.237,59	0	25.674,00	0	35.541,16	0	38.374,00	0	66.891,35	1 Dok	166.480,51	98,96%	98,96%	ST	ST
5.04.04.02.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	2 Dok	17.800,00	2 Dok	17.800,05	0	2.420,00	0	3.630,00	1	8.082,00	0	3.630,00	2 Dok	17.762,00	99,79%	99,79%	ST	ST
5.04.04.02.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	5 Lap	67.845,39	5 Lap	154.672,98	2	67.189,50	2	68.364,00	1	16.899,50	-	,00	5 Lap	152.453,00	98,56%	98,56%	ST	ST
5.04.04.02.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	3 Unit	538.029,81	3 Unit	703.360,00	-	,00	-	,00	-	,00	3	692.042,57	3 Unit	692.042,57	98,39%	98,39%	ST	ST

5.04.04.02.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	1 Lap	241.847,30	1 Lap	400.000,00	0	30.097,00	0	108.845,00	0	83.713,00	0	167.230,00	1 Lap	389.885,00	97,47%	97,47%	ST	ST
5.04.04.02.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	12 Lap	398.601,80	12 Lap	970.592,00	1	48.032,32	1	86.883,49	2	175.263,00	8	613.469,94	11 Lap	923.648,75	95,16%	95,16%	ST	ST
5.04.04.02.01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	2500 OP	169.548,00	2500 OP	220.000,00	276	24.261,00	271	23.880,00	381	33.487,50	1.371	120.674,00	2299 OP	202.302,50	91,96%	91,96%	ST	ST
5.04.04.02.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	1 Dok	327.261,75	1 Dok	265.600,00	0	11.566,00	0	110.689,40	0	102.287,79	0	39.553,79	1 Dok	264.096,97	99,43%	99,43%	ST	ST
5.04.04.02.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	800 Layanan	239.778,00	800 Layana n	285.000,00	117	41.514,00	126	44.926,00	254	90.603,00	286	101.821,00	783 Layan an	278.864,00	97,85%	97,85%	ST	ST
5.04.04.02.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	6 Dok	122.050,00	6 Dok	306.900,00	1	30.675,00	1	29.460,00	2	95.475,50	3	137.355,40	6 Dok	292.965,90	95,46%	95,46%	ST	ST
5.04.04.02.01.11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	1 Dok	488.864,80	1 Dok	694.137,50	0	40.410,00	0	124.790,10	0	159.070,52	1	361.691,12	1 Dok	685.961,75	98,82%	98,82%	ST	ST
5.04.04.02.01.12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	1 Dok	17.894,37	1 Dok	48.000,00	0	4.854,85	-	,00	-	,00	1	39.924,00	1 Dok	44.778,85	93,29%	93,29%	ST	ST
5.04.04.02.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	100 Dok	366.769,73	100 Dok	325.954,30	10	32.530,00	26	86.325,00	44	143.526,00	18	58.693,00	99 Dok	321.074,00	98,50%	98,50%	ST	ST

5.04.04.02.01.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Lap	243.487,00	1 Lap	503.881,00	0	48.804,70	0	85.217,40	1	270.283,50	0	96.776,90	1 Lap	501.082,50	99,44%	99,44%	ST	ST
5.04.04.02.01.15	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	1 Lap	45.124,00	1 Lap	164.161,18	0	21.021,43	0	38.439,10	0	13.600,00	0	78.959,83	1 Lap	152.020,35	92,60%	92,60%	ST	ST
Rata-rata capaian kinerja (%)																	97,33%	97,33%		
Predikat Kinerja																	ST	ST		

Keterangan: Sangat Tinggi (ST); Tinggi (T); Sedang (S); Rendah (R); Sangat Rendah (SR), Angka dalam ribuan rupiah (000)

Sub kegiatan Renja PD terdiri dari 48 (Empat Puluh Delapan) sub kegiatan. Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan Renja, yaitu sebesar 97,33% dengan predikat kinerja ST (Sangat Tinggi), Sementara tingkat penyerapan anggarannya, yaitu sebesar 97,33%.

BAB IV

FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA

Faktor pendorong dan penghambat pencapaian kinerja merupakan analisis terhadap kondisi yang berpengaruh terhadap pencapaian kinerja. Berdasarkan hasil analisis capaian kinerja sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta penyerapan anggaran Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang pada Triwulan IV Tahun 2024 di atas, ditemukan beberapa faktor pendorong dan penghambat yang berpengaruh terhadap pencapaian kinerja, sebagai berikut :

a.1. Faktor Pendorong

- a. Sumber Daya Manusia yang dapat diandalkan serta dapat menyesuaikan dengan lingkungan pekerjaan dimana teknologi akan terus berkembang seiring jaman.
- b. Sistem pengendalian Intern yang tidak berjalan dengan baik sehingga menjadikan kontrol terhadap kinerja maupun penyimpangan terhadap wewenang agar tetap terkendali.
- c. Terdapat SOP yang jelas diantara pembagian tugas serta wewenang, sehingga dapat meminimalisir benturan kepentingan diantara personel dan pemangku kebijakan.

a.2. Faktor Penghambat

- a. Keterbatasan SDM yang ada, baik dalam pengelolaan Program dan Kegiatan pada masing-masing bidang dilingkungan OPD dikarnakan rangkap pekerjaan.
- b. Kurangnya koordinasi yang dibangun antar bidang, sehingga terdapat kesan adanya persaingan dan berjalan masing-masing.
- c. Kurang cepat dalam mengambil keputusan dan menganalisa suatu masalah ketika terjadi miskomunikasi dan benturan diantara pemegang keputusan dan personil atau staf.

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI TINDAK LANJUT

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil identifikasi faktor-faktor yang mendorong dan menghambat tercapainya target kinerja sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan di bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan:

- a. Pada sub kegiatan Renja PD terdiri dari 48 (Empat Puluh Delapan) sub kegiatan. Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan Renja, yaitu sebesar 94,84% dengan predikat kinerja ST (Sangat Tinggi), Sementara tingkat penyerapan anggarannya, yaitu sebesar 94,84%.

5.2. Rekomendasi Tindak lanjut

Berdasarkan kesimpulan di atas, adapun rekomendasi yang dirumuskan dan perlu ditindaklanjuti untuk peningkatan kinerja PD, yaitu sebagai berikut :

- a. Memacu bidang-bidang dilingkungan OPD untuk konsisten melakukan percepatan penyerapan anggaran sesuai dengan permintaan anggaran kas yang diusulkan serta tertib administrasi.
- b. Selalu menghimbau kepada PPTK untuk segera merealisasikan kegiatan yang dikelolannya.
- c. Selalu berkoordinasi dengan bidang-bidang maupun atasan langsung dilingkungan OPD serta bekerjasama dalam pengendalian intern serta mengevaluasi kegiatan yang dikelola.

LAMPIRAN

(Tabel matrik hasil perhitungan Evaluasi Formulir E.81)